

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah perkotaan merupakan salah satu perbincangan hangat seluruh negara, termasuk di negara maju maupun negara berkembang. Negara Indonesia termasuk dalam negara berkembang dengan pertumbuhan jumlah penduduk terbesar keempat sebanyak 265 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk terbesar, maka masalah sampah di Indonesia bukan lagi hal yang baru. Peningkatan volume sampah dapat dikatakan karena jumlah penduduk yang meningkat dan lahan yang terbatas untuk pembuangan akhir sampah sehingga menjadi permasalahan yang harus segera dipecahkan. Sehingga dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, maka beresiko dapat meningkatkan volume limbah atau sampah berupa sampah organik maupun sampah anorganik (Widiyanto et al., 2019). Berger dan Goldfarb (2017) menjelaskan sampah sebagai sumber permasalahan *harus* dapat dihadapi dengan bijak.

UU RI No. 18/2008 mengenai pengelolaan sampah, menyebutkan "sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, sampah adalah bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan yang ditolak dan dibuang". Bashir dkk (2018) menambahkan bahwasanya sampah memiliki konseptual sebagai material yang tidak bernilai untuk dibuang dengan tidak mengesampingkan fungsi asli bahan tersebut.

Dapat diketahui bahwa sampah menjadi salah satu permasalahan yang dapat mengganggu lingkungan hidup. Berdasarkan UU RI No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa "lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Sehingga, setiap masyarakat wajib dalam melestarikan lingkungan hidup termasuk menjaga serta merawat, karena dapat mempengaruhi kualitas hidup.

Propinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam salah satu propinsi di Indonesia bagian timur yang sedang geliat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di ibu kota yaitu kota Makassar, pusat pembangunan sekaligus sebagai kiblat bagi kabupaten/kota di seluruh Sulawesi Selatan dalam hal pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar di tahun 2013-2015 rata-rata 79,42 termasuk dalam kategori sedang. Namun sebagai kota besar di Indonesia bagian timur, Makassar yang berpenduduk 1,4 juta jiwa, dengan jumlah kecamatan sebanyak 14 dan kelurahan sebanyak 143. Dengan kepadatan penduduk tersebut, maka berakibat pada volume sampah yang dihasilkan sangat besar, baik dalam bentuk sampah organik ataupun anorganik. Masyarakat di kota Makassar belum terlalu peduli terhadap sampah yang mana dapat mengakibatkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. permasalahan yang dapat terjadi apabila pengelolaan sampah kurang baik, dapat terjadi banjir, dan juga permasalahan kesehatan bagi masyarakat jika tempat

tinggalnya dekat dengan pembuangan sampah liar. Dengan demikian, diperlukan adanya kesadaran dari pemerintah kota Makassar bersama dengan warganya dalam mengelola sampah dan mengetahui dampak kerugian yang dapat ditimbulkan dari permasalahan sampah.

Pemerintah kota Makassar membuat peraturan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, yaitu Perda no. 4/2011 mengenai pengelolaan sampah pada pada poin b disebutkan "masalah mengenai persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku." Dari peraturan tersebut, kemudian masyarakat diharapkan menerapkan sistem 6R yaitu *Reduce* (kurangi pemakaian), *Reuse* (pemakaian kembali), *Recycle* (daur ulang), *Repair* (memperbaiki barang yang rusak), *Refuse* (menolak mengkonsumsi), *Rethink* (berpikir kembali). Kegiatan tersebut dapat berhasil tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga harus ada sinergitas dari warga dan pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan sampah.

Di tahun 2014, terjadi pergantian kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu Bapak Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto sebagai Walikota dan Bapak DR. Syamsu Riza, S.Sos, M.Si sebagai wakil Walikota. Dengan pergantian kepemimpinan, diharapkan dapat melahirkan berbagai macam ide terkait pembangunan dengan demikian dapat dimasukkan dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Pendek).

Permasalahan kebersihan ini tidak kunjung selesai dan hadir di tiap tahun serta belum ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai program dihadirkan oleh pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan/rencana yang diusung oleh Walikota Makassar yaitu Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto atau yang lebih akrab dikenal sebagai Danny Pomanto adalah Program “Gerakan Makassar' Tidak Rantasa (Gemar MTR)”. Program yang dihadirkan pada April 2014 oleh pemerintah kota Makassar sebagai bentuk komitmen, kepedulian sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa Makassar dapat menjadi kota nyaman dan tidak rantasa'. Hadirnya program MTR dikarenakan kondisi lingkungan kota Makassar yang kotor dan masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan, dimana masih didapati masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dengan adanya fenomena tersebut, mengakibatkan volume sampah terjadi peningkatan.

Penggunaan kata 'Rantasa' sendiri merupakan bahasa Makassar, dan mempunyai arti 'kotor atau jorok'. Dari penamaan itu diharapkan program MTR ini dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat dalam menjadikan Makassar lebih baik lagi dalam hal kebersihan. Program ini juga merupakan bentuk usaha untuk penyadaran dan mengubah pola pikir masyarakat dalam mengutamakan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hadirnya program ini sebagai bagian dari budaya siri'na pace yang merupakan falsafah kehidupan masyarakat Bugis dan Makassar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dideklarasikan sebuah program yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dan diharapkan agar masyarakat dapat mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa dukungan masyarakat maka Program Makassar Tidak Rantasa tidak dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil observasi, pengimplementasian program MTR di beberapa kecamatan dapat dikatakan belum berjalan sesuai harapan. Hal ini diketahui setelah program ini berjalan selama dua belas bulan, kondisi kota Makassar pada saat itu masih belum terlalu tampak adanya perubahan dari sisi kebersihan. Masih terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan dan juga berserakan, ditambah minimnya kesadaran dari masyarakat mengenai kebersihan lingkungan.

Walikota Makassar dalam menjalankan Program MTR telah membuat instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung MTR. Khusus untuk lurah, mensosialisasikan Program MTR kepada masyarakat dari rumah ke rumah (*door to door*) melalui brosur-brosur. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum tahu yang dimaksud dengan Program MTR dan bagaimana konsep pelaksanaannya sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikir masyarakat.

Melihat kondisi di atas maka wajar jika sampai saat ini program Makassar Tidak Rantasa tidak terelisasi dengan baik. Kekuatan dalam menjalankan Gemar MTR juga belum ada, baik Perda maupun Perwali yang

membahas pengolahan sampah secara khusus di Kota Makassar. Dari hal tersebut dapat dipertanyakan kesiapan pemerintah terutama aparatur pemerintah akan kesiapannya dalam menjalankan Makassar Tidak Rantasa. Agar program tersebut sukses, diperlukan adanya sinergitas, baik dari pemerintah tingkat kota hingga kelurahan, masyarakat dan juga pelaku usaha. Dapat diketahui bahwa peran stakeholder ini dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota dalam melaksanakan setiap program belum berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan program MTR berdasarkan dari surat keputusan Walikota Makassar kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar. Menurut Walikota Makassar bapak Danny Pomanto "MTR ini adalah gerakan rekonstruksi moral yaitu dengan merekonstruksi cara pandang masyarakat untuk hidup bersih terutama berkaitan dengan sampah." (Badan Arsip dan Perpustakaan Makassar, 2014). Kota Makassar memiliki dua masalah besar mengenai persampahan yaitu 1) masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, dan 2) manajemen persampahan yang kurang maksimal.

Maxwell Maltz dalam penelitiannya tentang pola pembentukan kebiasaan selama 21 hari. Pola pembentukan kebiasaan dapat mengantarkan suatu perubahan untuk kebiasaan baru seseorang. Pola tersebut adalah acuan dasar untuk penerapan kesadaran kolektif dalam masyarakat baik itu pada penerapan kebersihan lingkungan. Karena pada saat ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih masih menjadi permasalahan yang sulit untuk dibiasakan, hal tersebut terlihat jelas di Kota Makassar secara universal, sebab

sampah masih menjadi pemandangan yang kerap menyapa hari-hari kita, pemandangan jauh dari kata bersih akan membuat risih, ditambah lagi dengan kemacetan yang mencekam, polusi udara yang kurang sedap dihirup, akan merangsang adanya rasa jengkel tersendiri. Fenomena ini akan berdampak bagi kesadaran individu yang menganggap bahwa pemandangan kumuh telah menjadi kondisi yang wajar dikarenakan terlena oleh keadaan lingkungan tersebut (Novianti, Sumberartha dan Amin, 2019).

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdapat keluhan dari masyarakat mengenai masalah kebersihan. Dari data Bulan April–Juni tahun 2015 di bagian pengaduan hubungan masyarakat, dan sekretariat Kota Makassar telah terjadi peningkatan aduan, diantaranya terkait masalah kebersihan dari 8 hingga 13 aduan (Humas Kota Makassar, 2015).

Dengan melihat kondisi di atas maka keberhasilan dari program yang sedang berjalan, didasarkan kutipan Boateng dan Amankwaa (2016), penduduk yang berkualitas itu diharapkan dapat mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan Program MTR adalah kualitas hidup masyarakat. Berangkat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang apapun, maka dapat berdampak pada kualitas hidup seseorang. Baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi yang baik antara aparaturnya pemerintah dengan masyarakat dalam upaya memenuhi kualitas hidup yang baik.

Kualitas hidup masyarakat sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Dengan adanya kemajuan IPTEK di setiap bidang, dapat berdampak pada kualitas hidup seseorang. Baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi yang baik antara aparat pemerintah dengan masyarakat dalam upaya memenuhi kualitas hidup yang baik.

Kualitas hidup tidak dapat didefinisikan dengan pasti karena kualitas hidup merupakan sesuatu hal yang subjektif. Namun, kualitas hidup dapat dijadikan aspek untuk menggambarkan kondisi kesehatan seseorang (Larasati, 2012). Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas hidup yang mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan.

Kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh adalah pengetahuan. Di era globalisasi saat ini, dimana informasi terbuka seluas-luasnya, begitu pula dengan hadirnya pengetahuan yang dapat diserap oleh berbagai pihak. Okioga (2013) menjelaskan hal serupa bahwasannya pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan menyempurnakan sistem administrasi negara secara transparan, efisien dan efektif, sehingga harus ada komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Sebagai khasanah kekayaan mental yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung maka pengetahuan dapat memperkaya kehidupan di setiap

lini. Rajaratenam, dkk, (2014:225) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dapat mempengaruhi perilakunya, sehingga jika pengetahuan seseorang baik maka perilakunya pun dapat semakin baik. Danilewicz (2018) mengutip dalam penelitiannya bahwa pengetahuan umumnya diperoleh melalui mata dan telinga. Sehingga, di dalam pengetahuan aspek domain kognitif yang mendominasi yaitu seperti mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis hingga mengevaluasi. Dengan demikian, pengetahuan dapat berasal dari hasil peristiwa setelah proses penginderaan terhadap suatu objek.

Selanjutnya, faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas hidup dari masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Kebijakan atau program yang pro masyarakat, dapat mengakibatkan tingkat partisipasi tinggi. Dikarenakan masyarakat merupakan aset utama di setiap pelaksanaan program yang sedang berjalan. Sebagaimana kutipan Manzoor, Shah, dan Saleem (2019) menekankan jika kebijakan menguntungkan masyarakat akan meningkatkan partisipasi yang tinggi juga dari masyarakat.

Kesediaan seseorang untuk berpartisipasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang dikatakan oleh Putman (1993) “bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan adalah adanya rasa saling ketergantungan, rasa saling percaya, dan adanya jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama (Tartari, 2015). Partisipasi tinggi dari masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung di setiap keberhasilan program, sehingga dalam

membuat program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari setiap program pro masyarakat ini dapat tercapai sesuai harapan.

Keberhasilan dari program yang sedang berjalan, selain karena partisipasi masyarakat namun ada juga karena terdapat nilai-nilai budaya yang mendasari keterlibatan masyarakat. Penjelasan tersebut didasarkan bahwa agar dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan penduduk yang berkualitas. (Boateng dan Amankwaa, 2016) Dengan harapan, dari kualitas penduduk tersebut masyarakat dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dalam Program MTR adalah peran stakeholder. dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan MTR untuk mengatasi masalah persampahan ini sangatlah dibutuhkan karena tanpa adanya sinergitas antara stakeholder dengan masyarakat maka program belum tentu dapat terlaksana dengan baik. Peran stakeholder sebagai sinergi dalam upaya semangat reformasi birokrasi dengan menerapkan *good governance*. Pemerintah kota dapat menyediakan *public service*, sebagaimana dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat (Wibisono, 2017). Sehingga, saat ini telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota yaitu dengan asas *good governance*.

Keberhasilan dari setiap program termasuk Program Makassar Tidak Rantassa' sangat dipengaruhi oleh peran aktif para pemangku kepentingan atau

stakeholder baik sebagai *subject* atau *object* dari program tersebut. Gonsalves, *et al.* dalam Iqbal (2007) menyebutkan bahwa stakeholder adalah siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Stakeholder tersebut dapat sebagai individu, kelompok, komunitas, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat.

Berdasarkan observasi dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terkadang sebatas memahami, sehingga kebijakan yang diberikan pemerintah kota belum maksimal. Juga lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah sehingga kualitas hidup masyarakat di kota Makassar masih rendah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan, partisipasi masyarakat disetiap program dan juga peran stakeholder yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sebagai upaya mendukung keberhasilan program Makassar Tidak Rantasa . *Novelty* (keterbaruan) dalam penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi program Makassar Tidak Rantasa' secara kuantitatif. Sedangkan di beberapa penelitian sebelumnya, hanya melakukan evaluasi pelaksanaan program MTR, dan juga melihat implikasi dari pelaksanaan program MTR.

Dari penjelasan latar belakang di atas, sehingga dapat disimpulkan perlu dilakukan kajian ilmiah tentang “Peranan Stakeholder dalam Program Makassar Tidak Rantasa (Studi Kausal Pengetahuan, Partisipasi masyarakat, dan Kualitas Hidup)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya adalah identifikasi masalah antara lain:

1. Peranan stakeholder yang belum efektif dan efisien. Stakeholder merupakan perpanjangan dari setiap kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah kota, sehingga peranan ini belum sepenuhnya dijalankan.
2. Belum maksimal pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai program Makassar Tidak Rantassa'. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi dasar untuk melakukan setiap program yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota, namun diketahui pengetahuan masyarakat hanya sebatas tahu dan belum sampai pada taraf untuk menganalisa manfaat dari program tersebut dihadirkan.
3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat diprogram MTR. Keterlibatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu keberhasilan suatu program, namun dalam program MTR ini masyarakat belum terlibat secara aktif.
4. Masih terdapat beberapa kualitas hidup masyarakat yang belum layak. Kehidupan masyarakat yang berkualitas menjadi salah satu syarat keberhasilan sebuah program, karena dengan begitu masyarakat tidak lagi memiliki pemikiran bahwa setiap program itu hanya menjadi urusan pemerintah saja tapi juga usaha bersama antara pemerintah dengan masyarakat.
5. Belum ada sinergi yang terjalin baik dalam mengkoordinasikan setiap program pemerintah kota dengan masyarakat. Sinergitas antara pemerintah,

masyarakat, maupun pelaku usaha menjadi modal keberhasilan suatu program, dengan adanya sinergi ini pencapaian program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6. Tingkat kesadaran masyarakat belum merata sehingga program MTR belum berjalan maksimal. Keberhasilan program ini dibutuhkan adanya kesadaran dari setiap lini terutama masyarakat dan pelaku usaha sebagai salah satu sasaran dari pelaksanaan program. Namun, saat ini kesadaran yang dimiliki masyarakat masih relatif kecil.
7. Belum meratanya informasi yang tersebar mengenai Program MTR. Informasi atau sosialisasi menjadi langkah awal dalam menjalankan program tersebut agar berhasil. Pemerataan informasi program MTR ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah kota, tapi juga dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT-RW yang menyampaikan setiap program yang berkaitan dengan masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dengan tujuan, permasalahan tersebut dapat terukur dan tidak terlalu luas. Adapun variabel yang dibatasi pada variabel bebas (*independent variable*) yaitu; 1) pengetahuan, 2) partisipasi masyarakat, dan 3) peran Stakeholder. Sedangkan kualitas hidup yang merupakan variabel terikat (*dependent variabel*).

D. Rumusan Masalah

Setelah melakukan identifikasi dan pembatasan masalah, selanjutnya perumusan masalah antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung pengetahuan terhadap kualitas hidup?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung partisipasi masyarakat terhadap kualitas hidup?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung kualitas hidup terhadap kualitas hidup?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung pengetahuan terhadap peran Stakeholder?
5. Apakah terdapat pengaruh langsung partisipasi masyarakat terhadap peran Stakeholder?

E. Signifikansi Penelitian

Adapun harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau signifikansi, baik signifikansi akademis dan signifikansi praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah peran stakeholder dalam program "Makassar Tidak Rantasa" dilihat dari perspektif pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan kualitas hidup. Selain itu, diharapkan pula menjadi pemer kaya studi ilmiah mengenai pengaruh pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan peran stakeholder terhadap kualitas hidup dalam program "Makassar Tidak Rantasa".

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas hidup agar dapat bersinergi disetiap program, salah satunya program Makassar Tidak Rantasa , mengingat program ini memiliki dampak yang sangat besar untuk terus berkembang dalam masyarakat sehingga dapat tercipta kota yang bersih dan bebas dari sampah. Selain itu, persoalan sampah merupakan persoalan yang terjadi disetiap wilayah di dunia, sehingga penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi persiapan Adipura sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tahun 2025 secara nasional dengan disahkannya regulasi Peraturan Pemerintah 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Bagi para stakeholder hal ini memberikan kontribusi penyadaran dalam menjaga lingkungan, terutama dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah, mendorong partisipasi masyarakat melakukan pengelolaan sampah sehingga dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang lebih baik lagi.